

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya, khususnya bidang pelayanan publik. Pemerintah telah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah untuk mendorong pelaksanaan sistem desentralisasi sebagai upaya pembangunan negara. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Desa merupakan unit sistem pemerintahan, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan di daerahnya. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa berupa pemberian anggaran khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk Dana Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Adapun pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, adanya alokasi dana desa semestinya menjadikan pengelolaan keuangan desa akan semakin transparandan akuntabel, baik dalam proses pencatatan, pengelolaan serta pelaporan.

Tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar evaluasi. Dengan demikian

akan mempermudah pengambilan keputusan ekonomi untuk melaksanakan kegiatan di masa selanjutnya. Oleh karena itu penyampaian laporan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang berterima umum. Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa

Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara (Kloby, 2009). Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dapat dikatakan rendah (Manopo, 2016). Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi (Nyland dan Pettersen, 2015). Menurut Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tidak seorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang ada di provinsi lampung dapat dilihat dari keakuratan sistem akuntansi keuangan desa, yang selalu di lakukan per periodenya, kendala informasi yang dimiliki oleh perwakilan desa akan membawa perubahan dengan membandingkan hasil yang dikelola mereka dengan yang dikelola orang lain. Pemerintah mencatat ada empat potensi masalah dana desa, yaitu regulasi yang belum lengkap dan terkadang tumpang tindih, tata laksana yang belum baik dan berkinerja, pengawasan yang lemah, dan pendamping yang memanfaatkan kelemahan aparatur desa. Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa masih harus terus ditingkatkan dan msih adanya penyimpangan dana desa (*sumber: Lampung Post*). Fenomena pengelolaan dana desa yang terjadi di Kecamatan Labuhan Ratu antara lain banyaknya permasalahan perangkat desa yang masih minim pengetahuan tentang regulasi dan aturan

pengelolaan dana desa. Hal ini mengakibatkan penyelesaian laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa tahap pertama di Kecamatan Labuhan Ratu terindikasi mengalami keterlambatan pelaporan. Pengelolaan dana desa menarik untuk di kaji disebabkan dana yang bermuara di desa bisa di katakan sangat tinggi, hal ini berpotensi menimbulkan tingkat penyalahgunaan kewenangan yang tinggi pula serta masih ada beberapa desa yang belum bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan desa tersebut, hal itu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Disamping itu kurang terbukanya perangkat desa atas pengelolaan keuangan desa juga menjadi sorotan di tengah masyarakat ini, teknologi juga ikut berperan yang mana masih sering di jumpai desa yang memaksimalkan teknologi yang telah difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan dana desa yang baik dan dapat meminimalisir kecurangan serta resiko yang tinggi.

Banyak faktor yang yang mempengaruhi akuntabilitas antara lain sumber daya aparatur desa. Sumber daya aparatur desa merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan. Demi terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang. Dengan memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional dan pola pelaksanaan pembangunan yang tepat. Dibutuhkan sumber daya manusia terutama perangkat desa yang profesional. Dari segi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan sesuai tugas yang diemban (Lasmana, 2017). Sumber daya yang berkualitas harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan/seminar, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Sembiring, 2013).

Faktor yang kedua adalah peran perangkat desa. Pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi juga dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2015). Semakin paham pamong desa akan tugas pokok dan fungsinya dalam pemerintahan desa maka akan berpengaruh pada semakin terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun dilapangan masih banyak

perangkat desa yang belum sepenuhnya paham dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan yang mereka pegang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak dikelola langsung oleh tim pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh desa. Seluruh pengelolaan barang dan jasa masih dilaksanakan oleh bendahara desa padahal tugas pokok dari bendahara desa yaitu melakukan penatausahaan keuangan desa.

Menurut Novia (2018) Permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari keakuratan sistem akuntansi suatu desa, transparansi yang selalu dilakukan per periodenya, keandalan informasi yang dimiliki oleh perwakilan desa akan membawa perubahan dengan membandingkan hasil yang dikelola mereka dengan yang dikelola oleh orang lain. Kerelevansian suatu pengelolaan keuangan desa juga ikut menjadi masalah di dalamnya. Pada masa sekarang keakuratan dalam sistem akuntansi keuangan desa dipertanyakan oleh banyak orang, karena melihat fasilitas dan juga perangkat desanya yang memang kurang disaring oleh badan perwakilan desa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Saragih (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel independen. Penelitian ini menambahkan variabel independen Kualitas Sumber Daya Manusia mengambil dari penelitian Lubis (2020) alasannya karena kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa dan kualitas sumber daya manusia SDM adalah nilai dari perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini untuk menemukan hasil yang baru atau memperluas dari penelitian sebelumnya.

Fenomena pengelolaan keuangan desa menarik untuk dikaji disebabkan dana yang bermuara di desa bisa dikatakan sangat tinggi, hal ini berpotensi menimbulkan tingkat penyalahgunaan kewenangan yang tinggi pula serta masih adanya beberapa desa yang belum bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan tersebut, hal itu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang sangat

berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Disamping itu kurang terbukanya perangkat desa atas pengelolaan keuangan desa juga menjadi sorotan di tengah masyarakat dewasa ini, teknologi juga ikut berperan yang mana masih sering dijumpai desa yang belum dapat memaksimalkan teknologi yang telah difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan dana desa yang baik dan dapat meminimalisir kecurangan serta resiko yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian untuk melihat pengaruh variabel tersebut dengan melibatkan perangkat desa yang berlokasi di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kualitas sumber daya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat di antaranya :

- a) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem akuntansi.
- b) Bagi peneliti, dapat menambahkan wawasan dengan menerapkan ilmu yang telah diperoleh secara teori dan lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi desa hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan/evaluasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang di lakukan oleh desa. Khusus nya mengenai motivasi dan disiplin karyawan perangkat desa.
- b) Bagi pihak perangkat desa diharapkan dengan adanya penelitian ini membantu penerapan sistem akuntansi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan kepala desa dengan pengambilan keputusan, serta membantu perangkat desa Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur untuk mengelolah desa.

3. Manfaat Teoritis

- a) hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya.

- b) Hasil penelitian dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan proposal skripsi ini, akan di uraikan secara tersusun dan singkat yang terdiri dari 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjabarkan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil statistik dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai kesimpulan hasil dari penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

